

Masyarakat, Kebudayaan dan Politik

Daftar Isi

Demokrasi Elitis? Relasi Kekuasaan Pasca-Pilkada Syarif Hidayat	169–180
Perilaku dan Sikap Sosial-Politik Mahasiswa dalam Pilpres 2009 Ari Pradhanawati	181–186
Kajian Pemanfaatan dan Pengembangan <i>E-Government</i> Achmad Habibullah	187–195
Strategi Peningkatan Akses Pasar dan Peluang Inovasi Usaha Kecil Nelayan Pasuruan Edy Wahyudi	196–205
Pengembangan Kapasitas Perencanaan Daerah dalam Pengelolaan Pesisir secara Terpadu di Pantai Timur Provinsi Sumatera Utara R. Hamdani Harahap	206–212
Management of Local Forestry Resources in Overcoming Poverty and Environmental Issues Slamet Rosyadi	213–220
Respon Komunitas Waria Surabaya terhadap Konstruksi Subjek Transgender di Media Indonesia Rachmah Ida	221–228
Pasang sebagai Modal Sosial Pengelolaan Hutan pada Masyarakat Adat Ammatowa Sarkawi B. Husain dan Sri Endah Kinasih	229–235
Wacana Dominan dalam Teks <i>Awig-awig</i> I.B. Putera Manuaba	236–243
Pengaruh Kausalitas Tingkat Fertilitas Total (TFR) Penduduk terhadap Tingkat Demokrasi Fendy E. Wahyudi	244–255

Perilaku dan Sikap Sosial-Politik Mahasiswa dalam Pilpres 2009

Ari Pradhanawati¹

FISIP, Universitas Diponegoro, Semarang

ABSTRACT

This paper describes and analyzes the behavior and social-political attitudes of Indonesian students in the presidential election of 2009. This paper assumes that students are not the majority of voters but their political attitudes and behavior in the election are more rational, critical and pragmatic. This paper is based on a research that used sociological approach and symbolic interaction and social exchange theories. Using random sampling technique out of total respondents 299 people with a margin of sampling error of 5 percent on 95 percent confidence level, the research found that behavioral and socio-political attitudes of students is very unique and unpredictable.

Key words: student, Indonesia, behavior, attitude, social, election of 2009

Mahasiswa dalam dimensi politik merupakan komunitas kampus yang berpeluang besar untuk menjadi calon pemimpin dan pemilik masa depan. Di sisi lain, mahasiswa dalam dimensi pemilih bukan merupakan mayoritas pemilih, tetapi sikap dan keputusannya dalam pemilu dapat dikatakan lebih rasional dan jauh dari kepentingan elit politik bahkan terkesan acuh tak acuh sehingga sering dikhawatirkan golput di kalangan mahasiswa sangat tinggi.

Hal itu sering ditandai dengan banyaknya unjuk rasa yang dilakukan mahasiswa dalam rangka menyalurkan aspirasi, dari aksi gelar poster, *happening art*, *performance art*, mogok makan, orasi dan lain sebagainya. sampai bentrokan fisik dengan sesama mahasiswa atau dengan aparat keamanan.

Demikian pula menjelang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2009, mahasiswa semakin gencar melakukan unjuk rasa menyikapi karut marut kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU), misalnya soal Daftar Pemilih Tetap (DPT), yaitu ditemukan kejanggalan-kejanggalan seperti pemilih ganda, NIK ganda, alamat ganda, pemilih nyasar, pemilih di bawah umur/balita, pemilih yang berstatus TNI/Polri, pemilih yang terselip, pemilih yang sudah meninggal dunia, pemilih yang masuk dalam DPS tetapi tidak masuk dalam DPT.

Jika para elit politik mau *set back*, kasus DPT tersebut adalah kasus lama/klasik karena selalu terjadi sejak diselenggarakannya Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) sejak

2005. Masalah DPT menjadi masalah yang serius tetapi tidak pernah ada penyelesaian dari kerumitan tersebut karena berkali-kali muaranya sama.

Perilaku memilih di kalangan mahasiswa sangat unik dan sulit ditebak baik sikap maupun keputusan mereka dalam menentukan pilihannya, hak suara mereka bagaikan "bola liar". Sikap mereka cenderung kritis, idealis dan rasional ketika dihadapkan pada kondisi dan fakta yang terjadi dalam proses demokrasi yang dijalankan oleh partai politik (parpol). Parpol dinilai gagal dalam menjalankan fungsi kepartaiannya, buktinya banyak kandidat yang diusung parpol dan menang dalam pilkada tidak sesuai dengan aspirasi/keinginan mahasiswa dan rakyat. Padahal jika kita mengambil pemikiran Huntington (2004), maka fungsi parpol itu adalah mengorganisir partisipasi massa di bidang politik, sekaligus mendekatkan jarak antara kekuatan sosial dengan penguasa.

Kegagalan parpol dalam membangun citra dapat menurunkan tingkat kepercayaan rakyat terhadap elit parpol dan dapat pula menyebabkan tingginya golput. Karena sekali parpol mengecewakan kepentingan konstituen, maka term politik akan sangat tidak menarik bagi rakyat, padahal rakyat sesungguhnya adalah penguasa tertinggi dari kedaulatan atas negara ini. Walaupun di lain pihak, golput itu sebuah fenomena galib/lazim/wajar, bahkan gejala golput berbanding lurus dengan lahirnya parpol baru atau menghidupkan kembali parpol lama. Dengan demikian golput adalah suara rakyat non

¹ Korespondensi: A. Pradhanawati, FISIP - Universitas Diponegoro, Semarang, Jalan Imam Bardjo, SH No. 1 Semarang. Jawa Tengah. Telp. 024-8450334. HP. 0816658849. E-mail: pradhanawatiari@rocketmail.com, pradhanawatiari@undip.ac.id

konvensional atau dapat dimaknai sebagai anak sah demokrasi karena golput sama dengan suara rakyat yang menghendaki alternatif yang lebih baik dan harus diapresiasi dan diberi respon (Permana, 2007).

Golput dalam konteks di sini bukan merupakan sebuah pembangkangan sipil (*civil disobedience*) tetapi lebih ke arah rendahnya partisipasi politik rakyat (Barker 1995 dalam Asy'ari 2007). Misalnya, angka partisipasi pemilih dari pemilih yang menggunakan hak pilih (*voter turnout*) dan pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya (*nonvoting participant*). Mereka yang tidak menggunakan hak pilihnya dikarenakan berbagai alasan, misalnya 1) tidak terdaftar sebagai pemilih, 2) sakit, 3) pergi, 4) lebih baik cari uang, 5) tidak ada uang, tidak nyoblos, dan lain sebagainya (Pradhanawati & Utomo 2007).

Bagaimana menjelaskan perilaku pemilih yang tidak memilih (*nonvoting behavior*)? Ada empat faktor yang memengaruhi perilaku tidak memilih (*nonvoting behavior*): 1) Faktor psikologis, misalnya kepribadian yang tidak toleran atau acuh tak acuh cenderung untuk tidak memilih, termasuk kepribadian yang apatis yaitu tidak berminat terhadap persoalan politik, 2) faktor sistem pemilu seperti pada Pemilu 2004 yang menganut sistem pemilu proporsional dengan daftar terbuka untuk memilih anggota DPR/ DPRD dan sistem pemilu berwakil banyak untuk memilih anggota DPD, kemudian pada Pemilu 2009 dengan menganut suara terbanyak untuk memilih anggota DPR/DPRD, 3) faktor kepercayaan politik, sosial dan ekonomi, 4) faktor latar belakang sosial ekonomi pemilih, misalnya tingkat pendidikan, pendapatan dan pekerjaan (Angus Campbell 1976 dalam Asy'ari 2007).

Sebuah keputusan (*decision*) yaitu menentukan pilihan dari beberapa alternatif pilihan yang tersedia. Pengambilan keputusan (*decision making*) itu menunjukkan pada proses terjadinya sebuah keputusan. Sedangkan keputusan politik adalah keputusan-keputusan yang diambil secara kolektif berdasarkan beberapa alternatif pilihan yang mengikat semua masyarakat (Budiardjo 2008).

Keputusan memilih dalam dimensi pemilu jika dianalogikan dengan perilaku pembelian di bidang bisnis bahwa keputusan pembelian yang salah akan berdampak langsung terhadap subjek dengan kehilangan utilitas barang atau jasa yang dibeli. Sedangkan keputusan yang salah dalam pemilu tidak memiliki efek langsung bagi si pengambil keputusan karena keputusan individu tidak mempunyai dampak besar kecuali keputusan kolektif (Down 1957 dalam Firmanzah 2008).

Keputusan memilih dalam kurun waktu pemilu adalah perilaku yang 'ekspresif' (misalnya seperti supporter sepakbola). Perilaku pemilih juga sangat dipengaruhi oleh loyalitas dua arah (imbal balik) dan ideologi yang dianut oleh pemilih dan ideologi yang dibawa kontestan pemilu, yang pada akhirnya pemilih akan mengelompokkan diri kepada kontestan yang memiliki ideologi yang sama dan menjauhkan diri dari ideologi yang berseberangan dengan pemilih (Brennan dan Lomasky 1993 dalam Firmanzah 2008). Sementara itu, persepsi mahasiswa mengenai preferensi terhadap seorang pemimpin dalam komunikasi interpersonal cenderung tidak objektif dan tidak akurat karena dipengaruhi oleh faktor-faktor lain, seperti *perceptual accentuation* dan *implicit personality theory* (Saptyasari 2004). Akhirnya, keputusan memilih itu sebagai suatu sikap yang sadar dan rasional, karena memilih itu hak bukan kewajiban serta tidak ada sanksinya.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Perilaku dan Sikap Sosial-Politik Mahasiswa dalam Pilpres 2009.

Sementara untuk mengkaji perilaku dan sikap memilih digunakan pendekatan sosiologi melalui: 1) teori interaksi simbolik (*symbolic interaction theory*), karena dalam aksi dan interaksi seseorang diharapkan mampu mengubah makna dan simbol serta membentuk makna-makna baru kemudian mempertimbangkan, memperkirakan dan akhirnya memilih salah satu dari beberapa alternatif pilihan atas dasar interpretasi, 2) teori pertukaran sosial (*social exchange theory*), yaitu tindakan sosial manusia dipengaruhi oleh pertukaran sosial yang seimbang, hubungan pribadi bersifat timbal balik, walaupun proses pertukaran sosial tersebut tidak selalu dapat diukur dengan uang atau barang, tetapi dapat berupa jasa. Kedua teori ini digunakan untuk mengkaji perilaku dan sikap sosial-politik mahasiswa dalam Pilpres 2009 yang dilakukan karena mendapatkan kompensasi yang berupa materi atau jasa.

Menurut Ritzer (1975) ada tiga paradigma dalam sosiologi, yaitu: 1) paradigma fakta sosial yang menyatakan bahwa struktur yang terdalem masyarakat memengaruhi individu, 2) paradigma definisi sosial yang menyatakan bahwa pemikiran individu dalam masyarakat memengaruhi struktur yang ada dalam masyarakat, 3) paradigma perilaku sosial yang menyatakan bahwa perilaku keajaiban dari individu yang terjadi di masyarakat merupakan suatu pokok permasalahan. Dalam hal ini interaksi antarindividu dengan lingkungannya akan membawa akibat perubahan perilaku individu yang bersangkutan.

Pandangan Ritzer (1975) tentang substansi teori interaksi simbolik adalah: 1) kehidupan bermasyarakat itu terbentuk melalui proses komunikasi dan interaksi antarindividu dan antarkelompok dengan menggunakan simbol-simbol yang dipahami maknanya melalui proses belajar. 2) tindakan seseorang dalam proses interaksi itu bukan semata-mata merupakan suatu tanggapan yang bersifat langsung terhadap stimulus yang datang dari lingkungannya atau dari luar dirinya, melainkan dari hasil sebuah *proses interpretasi* terhadap stimulus.

Dengan demikian esensi dari teori interaksi simbolik menurut Mulyana (2002) adalah suatu aktivitas yang merupakan ciri khas manusia, yakni komunikasi atau pertukaran simbol-simbol yang diberi makna. Bahwa individu dapat ditelaah dan dianalisis melalui interaksinya dengan individu yang lain. Dengan demikian, teori ini menggunakan paradigma individu sebagai subjek utama dalam realitas sosial.

Thibaut & Kelley (1959) memandang teori pertukaran sosial adalah hubungan interpersonal itu merupakan transaksi dagang, misalnya orang berhubungan dengan orang lain itu karena mengharapkan sesuatu yang memenuhi kebutuhannya. Jadi teori pertukaran dapat disimpulkan bahwa: "setiap individu secara sukarela memasuki dan tinggal dalam hubungan sosial hanya selama hubungan tersebut cukup memuaskan ditinjau dari segi ganjaran dan biaya". Berkaitan dengan teori tersebut, maka hubungan pertukaran dengan orang lain akan menghasilkan suatu imbalan bagi kita. Dengan demikian teori pertukaran sosial melihat antara perilaku dengan lingkungan itu terdapat hubungan yang saling memengaruhi (*reciprocal*). Karena lingkungan kita umumnya terdiri atas orang-orang lain, maka kita dan orang-orang lain tersebut dipandang mempunyai perilaku yang saling memengaruhi. Dalam hubungan tersebut terdapat unsur imbalan (*reward*), pengorbanan (*cost*) dan keuntungan (*profit*).

Sedangkan teori pertukaran sosial yang dikemukakan Homans (1974), mengandung asumsi dasar yaitu *cost* dan *reward*. Maknanya, pertukaran sosial adalah *distributive justice* bahwa sebuah imbalan harus sebanding dengan investasi. Bunyi proposisinya "seseorang dalam hubungan pertukaran dengan orang lain akan mengharapkan imbalan yang diterima oleh setiap pihak sebanding dengan pengorbanan yang telah dikeluarkannya yaitu makin tinggi pengorbanan, makin tinggi imbalannya dan keuntungan yang diterima oleh setiap pihak harus sebanding dengan investasinya, makin tinggi

investasi, makin tinggi keuntungan". Jadi Inti dari pertukaran sosial ini adalah perilaku sosial seseorang hanya bisa dijelaskan oleh sesuatu yang bisa diamati. Teori yang dipengaruhi oleh perspektif ini menekankan hubungan langsung antara perilaku yang teramati dengan lingkungan.

Metode

Penelitian ini dilaksanakan pada 4 Juni sampai 4 Juli 2009 dengan reponden mahasiswa sebanyak 299 responden yang terdiri dari 53,5 persen laki-laki dan 46,5 persen perempuan dengan usia di bawah 21 tahun sebesar 50,2 persen, usia 21–25 tahun sebesar 47,5 persen, dan sebesar 2,3 persen berusia lebih dari 25 tahun.

Responden tersebar di 12 provinsi yang meliputi 12 perguruan tinggi, yaitu Provinsi Nusa Tenggara Timur (Universitas Cendana = 15 orang = 5 persen), Jawa Timur (Universitas Brawijaya = 26 orang = 8,7 persen), Daerah Istimewa Yogyakarta (Universitas Gadjah Mada = 26 orang = 8,7 persen), Banten (Universitas Paramadina = 25 orang = 8,4 persen), Lampung (Universitas Lampung = 26 orang = 8,7 persen), Sumatera Selatan (Universitas Sriwijaya = 28 orang = 9,4 persen), Sumatera Barat (Universitas Andalas = 25 orang = 8,4 persen), Jambi (IAIN Sulthan Thaha Syaifuddin = 22 orang = 7,4 persen), Kalimantan Barat (STAIN Pontianak = 25 orang = 8,4 persen), Sulawesi Selatan (Universitas Hasanuddin = 25 orang = 8,4 persen), Sulawesi Utara (Universitas Samratulangi = 25 orang = 8,4 persen) dan Papua (Universitas Cendrawasih = 31 orang = 10,4 persen).

Tipe penelitian ini bersifat deskriptif-analitik, sedangkan teknik pengambilan sampel menggunakan *random sampling* dengan *margin of error* sebesar 5 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Hasil Penelitian

Pertimbangan memilih sangat ditentukan oleh isu-isu dan kebijakan politik, demikian pula perilaku memilih dalam memilih kandidat politik karena dianggap sebagai representasi dari agama atau dari kelas sosialnya atau sebagai ekspresi dari sikap loyal pada partai atau figur tokoh tertentu (Nursal 2004).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan utama mahasiswa dalam memilih kandidat presiden dan wakil presiden, 1) pasangan Megawati Soekarnoputri - Prabowo Subiyanto (Mega-Prabowo), 2) pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono (SBY-Boediono),

3) pasangan Jusuf Kalla-Wiranto (JK-Wiranto) selain pertimbangan visi, misi dan program (55,6 persen) juga berdasarkan pada pertimbangan karakter pribadi (21,2 persen), pengalaman (16,7 persen), dukungan parpol (1 persen) dan pertimbangan lainnya (5,5 persen).

Pendidikan pemilih sebagai bagian dari pendidikan politik rakyat dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya sosialisasi informasi pemilih (politik) merupakan keniscayaan yang krusial karena melalui proses sosialisasi politik ini masyarakat akan mengenal dan memahami nilai-nilai politik tertentu untuk menjadi pemilih yang cerdas, sehingga melalui informasi pemilu tersebut akan memengaruhi sikap dan perilaku politik rakyat (Permana 2007, Pradhanawati 2005). Terkait dengan itu, hasil penelitian menjelaskan bahwa posisi mahasiswa sebagai pemilih cerdas juga terlihat dari sejumlah hal yang dinilai penting dalam mempertimbangkan kandidat, pendidikan misalnya, dinilai oleh 73,3 persen responden sangat penting.

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa mahasiswa sebagai pemilih yang cerdas sudah waktunya mengaplikasikan pendidikan politik dengan tepat dan baik, yaitu memilih pemimpin berdasarkan pandangan yang luas atau tidak berpandangan sempit.

Demikian halnya dengan usia yang dipandang oleh 12,7 persen sangat penting dan 55,4 persen penting. Sementara pada sisi lain bagi mahasiswa, faktor kesukuan kandidat menurut sebagian besar responden (68,4 persen) tidak lagi penting, dan hanya 23,5 persen menganggap penting dan sangat penting (5,5 persen). Dan sisanya menjawab tidak tahu (2,6 persen).

Hasil penelitian tersebut jika dikaitkan dengan teori interaksi simbolik, ternyata mahasiswa tidak memandang lagi persoalan dikotomi kesukuan kandidat dengan menggunakan simbol-simbol bahwa kandidat harus orang Jawa, atau kandidat harus berasal dari latar belakang yang berbeda, misal: Jawa dan luar Jawa, sipil dan militer, dan lain-lain. Maknanya, mahasiswa mulai melakukan perubahan dalam memilih pemimpin yaitu sudah tidak memandang simbol-simbol kesukuan atau latar belakang melalui dikotomi-dikotomi yang selama ini diwacanakan tetapi lebih banyak melihat faktor kapabilitas kandidat, misalnya harus mempunyai wawasan yang luas.

Kaitannya dengan itu, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pertimbangan memilih juga ditentukan oleh bagaimana kandidat melihat kondisi kebangsaan saat ini, yaitu dalam pandangan

mahasiswa sebesar 38,8 persen menyatakan bahwa pengangguran dipandang sebagai persoalan utama yang secepatnya segera diatasi. Berikutnya adalah persoalan kemiskinan (22,7 persen), korupsi (21,4 persen), akses pendidikan (11,7), kerusakan lingkungan (7 persen), stabilitas harga sembilan bahan pokok (1,3 persen), dan keamanan (1,3 persen).

Sikap politik mahasiswa dalam Pilpres 2009 dapat dijelaskan dari perspektif interaksionisme simbolik, karena dalam interaksionisme simbolik, apa yang kita lakukan sebetulnya merupakan respon yang terjadi melalui suatu proses pemberian makna, sebab tindakan seseorang dalam proses interaksi itu bukan merupakan suatu tanggapan yang sifatnya langsung terhadap stimulus yang datang dari luar dirinya, melainkan hasil dari sebuah *proses interpretasi* terhadap stimulus, misalnya media massa dengan informasi yang dibawanya itu dapat mengilhami pikiran pemilih (baca: mahasiswa) untuk bersikap dan bertindak tertentu terhadap peristiwa atau fenomena yang terjadi berdasarkan simbol-simbol yang diterima kemudian memaknainya, contohnya berita-berita tentang Pilpres 2009 baik di koran, majalah, televisi, internet, dan lain-lain.

Hasil penelitian membuktikan bahwa mahasiswa memaknai simbol-simbol dalam interaksi simbolik melalui sikap politiknya yang ditandai dengan keinginan mereka untuk menggunakan hak pilih yaitu sebesar 85,6 persen, sedangkan mereka yang tidak menggunakan hak pilih sebesar 3 persen dan sisanya sebesar 11,4 persen menyatakan belum dapat menentukan pilihan.

Keputusan itu diperkuat dengan keyakinan mereka bahwa Pilpres 2009 dapat merubah kondisi bangsa Indonesia dari persoalan kemiskinan, pengangguran, korupsi, dan lain-lain. yaitu sebesar 59,9 persen menyatakan yakin dan 12,7 persen menyatakan sangat yakin, sedangkan yang menyatakan tidak yakin 25,4 persen dan sangat tidak yakin sebesar 2,0 persen.

Keyakinan itu diperkuat lagi oleh sikap mahasiswa yang memandang bahwa pilpres dianggap penting (33,1 persen) bahkan sangat penting (61,2 persen) untuk perkembangan demokrasi di Indonesia karena rakyat memilih pemimpinnya secara langsung sebagai bagian dari pergantian kepemimpinan lima tahun sekali. Sedangkan bagi mahasiswa yang memandang pilpres tidak penting (1,7 persen) dan sangat tidak penting (4,0 persen) karena mereka menganggap tidak akan memberikan perubahan yang berarti bagi rakyat.

Mahasiswa dapat diidentikan dengan pemilih

cerdas manakala mereka secara sadar menggunakan hak pilihnya berdasarkan kriteria-kriteria kandidat, misalnya bagaimana mereka memahami visi, misi dan program para kandidat. Kondisi tersebut jika dikaitkan dengan teori pertukaran sosial, bahwa kepuasan hidup hanya dapat dicapai dengan cara menggerakkan orang lain supaya berperilaku terhadap kita, atau dengan kata lain rasa kepuasan kita bersumber pada tindakan manusia untuk mencari imbalan dengan mengeluarkan biaya. Keuntungan yang diperoleh dari pertukaran sosial menggambarkan perbedaan antara imbalan dengan biaya. Maknanya, para kandidat harus mampu menyakinkan pemilih melalui visi, misi dan programnya apabila ingin mendapat suara dari kaum mahasiswa.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa distribusi pemahaman mahasiswa terhadap visi, misi dan program yang diusung oleh ketiga kandidat ternyata tidak merata karena mereka lebih mengenal slogan artinya belum menyentuh ke substansinya, misalnya: 47,7 persen menyatakan tahu visi, misi dan program kandidat Mega-Prabowo dengan slogan 'Ekonomi Kerakyatan' yang di dalamnya memuat isu kebijakan idealis yang bersifat pragmatis dan sosialis dengan sasaran wong cilik.

Kandidat SBY-Boediono diketahui oleh 56 persen responden dengan slogan 'Lanjutkan' dengan menjual isu pertumbuhan ekonomi makro yang memuat isu kebijakan idealistik yang bersifat pragmatis dan realistis serta menggunakan konsep pertumbuhan ekonomi berbasis luas, sedangkan sasarannya golongan menengah ke bawah.

Sedangkan kandidat JK-Wiranto diketahui oleh 48,5 persen responden dengan slogan 'Lebih Cepat Lebih Baik' dengan memasukkan isu kemandirian ekonomi yang memuat persoalan kebijakan pragmatis, jelas dan hasilnya nyata serta menganut ekonomi pasar liberal dan kapitalistik dengan sasaran golongan menengah.

Fenomena minimnya pemahaman terhadap visi, misi, dan program para kandidat memperlihatkan kurang maksimalnya sosialisasi politik seperti yang digambarkan oleh Gabriel A. Almond (1976) bahwa sosialisasi politik menunjukkan pada proses di mana sikap-sikap politik dan pola-pola tingkah laku politik diperoleh atau dibentuk, dan juga merupakan sarana untuk menyampaikan patokan-patokan politik dan keyakinan-keyakinan politik kepada masyarakat. Padahal salah satu fungsi utama partai politik menurut Miriam Budiardjo (1981) adalah melakukan sosialisasi politik yang terjabarkan melalui distribusi informasi menyangkut yang visi, misi, dan program kepada para pemilih.

Dengan demikian media kampanye yang digunakan para kandidat baik melalui baliho, iklan di televisi/koran spanduk, dll seharusnya dapat digunakan sebagai ajang pengenalan visi, misi dan program yang sangat efektif ternyata belum maksimal.

Kalaupun distribusi tersebut dilakukan secara massif, nampaknya hanya sebatas kalimat singkat yang ditujukan untuk mengingatkan pemilih terhadap kandidat tanpa dibarengi dengan perluasan dari visi, misi, dan program yang disusun. Hal ini sejalan dengan gagasan Rush & Althoff (2001) bahwa sosialisasi politik sangat diperlukan.

Demikian pula minimnya pemahaman terhadap visi, misi, dan program para kandidat jika ditinjau dari teori interaksi simbolik, bahwa memahami simbol-simbol, dan saling menyesuaikan makna dari simbol-simbol tersebut membutuhkan waktu yang cukup lama, karena simbol-simbol itu memberikan pembatasan terhadap tindakannya, dengan kemampuan berpikir yang dimilikinya, manusia mempunyai kebebasan untuk menentukan tindakan dan tujuan-tujuan yang hendak dicapainya.

Dari sisi popularitas, ketiga kandidat di mata mahasiswa cukup tinggi yaitu sebesar 95,9 persen. Hal ini tentu bukanlah sesuatu yang mengejutkan melihat ketiga pasang kandidat bukanlah sosok baru dalam dunia politik maupun pemerintahan, sehingga tingkat pengetahuan para mahasiswa cukup tinggi.

Nampaknya faktor kepribadian kandidat sangat memengaruhi mahasiswa dalam perilaku memilih (*voting behavior*) untuk menentukan keputusan politiknya meskipun bukan faktor pertimbangan yang utama. Terkait dengan faktor tersebut, hasil penelitian menunjukkan bahwa jika dilihat dari elektabilitas apabila pilpres dilaksanakan hari ini, maka kandidat SBY-Boediono menduduki peringkat tertinggi yaitu sebesar 72,4 persen. Sedangkan elektabilitas JK-Wiranto diurutan kedua dengan 21,6 persen dan Mega-Prabowo mendapat 6 persen.

Tingginya elektabilitas pasangan kandidat SBY-Boediono nampaknya banyak ditopang oleh pencitraan melalui media seperti yang dijelaskan oleh Berger dan Luckman (1966) bahwa pencitraan kandidat dapat dilakukan melalui interaksi sosial dalam sebuah proses dialektis meliputi 1) *subjective reality*, 2) *symbolic reality*, 3) *objective reality*. Pada realitas simbolik inilah letak kekuatan media (koran, majalah, tabloid, televisi, radio, dan lain-lain) yang kemudian dapat memengaruhi opini pemilih karena secara nyata konstruksi definisi tentang realitas yang dimiliki individu-individu (*subjective reality*) ini sangat dipengaruhi oleh ekspresi simbolik yang

diberikan media. Buktinya pemanfaatan media dalam meningkatkan popularitas SBY pada Pilpres 2004 ternyata telah membius pemilih melalui penampilan SBY yang berhasil dikemas dengan bagus melalui tampilan media. Dalam perspektif pertukaran sosial hubungan antara kandidat dengan media menggambarkan hubungan yang saling menguntungkan, termasuk di dalamnya adalah popularitas yang diperoleh masing-masing pihak.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa tingginya tingkat elektabilitas SBY-Boediono sejalan dengan pandangan sebagian besar mahasiswa (44,8 persen) terhadap penilaian visi, misi, dan program yaitu SBY-Boediono dinilai memiliki program yang paling baik, kemudian JK-Wiranto (17,4 persen), dan Mega-Prabowo (9 persen), meskipun sejumlah mahasiswa (23,6 persen) masih cukup banyak yang tidak tahu akan visi, misi, dan program terbaik di antara ketiga kandidat.

Simpulan

Perilaku dan sikap sosial-politik di kalangan mahasiswa pada Pilpres 2009 menunjukkan gejala yang positif walaupun perilaku dan sikap sosial-politik mahasiswa sangat unik dan sulit ditebak dalam menentukan pilihannya. Dalam perspektif teori interaksi simbolik (*symbolic interaction theory*) mahasiswa memaknai simbol-simbol dalam interaksi simbolik melalui sikap sosial-politiknya yang ditandai dengan keinginan mereka untuk menggunakan hak pilih. Keputusan itu diperkuat dengan keyakinan mereka bahwa Pilpres 2009 dapat merubah kondisi bangsa Indonesia dari persoalan kemiskinan, pengangguran, korupsi, dan lain-lain. Mahasiswa juga memandang bahwa pilpres dianggap sangat penting, walaupun di sisi lain distribusi pemahaman mahasiswa terhadap visi, misi dan program yang diusung oleh ketiga kandidat ternyata tidak merata. Nampaknya faktor kepribadian kandidat sangat memengaruhi mahasiswa dalam perilaku memilih (*voting behavior*) untuk menentukan sikap sosial-politiknya, meskipun bukan faktor pertimbangan yang utama.

Dalam perspektif pertukaran sosial yang lebih banyak menggambarkan saling manfaat yang bisa diperoleh dalam hubungan antara kandidat dengan pemilih. Keuntungan atau saling manfaat yang

diperoleh itu dapat bersifat materiil, tetapi bisa juga bersifat immateriel dan sosial, termasuk popularitas yang bisa diperoleh masing-masing pihak. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya dukungan terhadap teori pertukaran sosial (*social exchange theory*) yaitu terjadinya pertukaran sosial akibat dari interaksi sosialnya dalam hal ini terjadi interaksi kepentingan antara kandidat dan pemilih, proposisi rasionalitas sebagai dasar dari perilaku dan sikap mahasiswa dalam Pilpres 2009.

Daftar Pustaka

- Almond, GA and Powell, GB Jr. (1976) *Comparative Politics: A Developmental Approach*. New Delhi: Oxford & IBH Publishing Co.
- Asy'ari, H (2007) *Pilkada: Catatan Hukum dan Politik*. Semarang: Diponegoro University Press.
- Berger, PL, and Luckman, T (1967) *The Social Construction of Reality*. New York: Anchors Book.
- Budiardjo, M (2008) *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Firmanzah (2008) *Marketing Politik-Antara Pemahaman dan Realitas*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Homans, GC (1974) *Elementary Forms of Social Behavior*. New York: Harcourt, Brace, Jovanovich.
- Huntington, SP (2004) *Tertib Politik Pada Masyarakat yang Sedang Berubah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Mulyana, D (2002) *Metodologi Penelitian Kualitatif, Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nursal, A (2004) *Political Marketing*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Permana, S (2007) *Kanibalisme Politik: Manusia Indonesia Dalam Pergulatan Kekuasaan*. Bandung: Indonesia Masa Depan.
- Pradhanawati, A (2005) *Pilkada Langsung Tradisi Baru Demokrasi Lokal*. Surakarta: Konsorsium Monitoring dan Pemberdayaan Institusi Publik.
- Pradhanawati, A & Utomo, TC (2009) *Pemilu dan Demokrasi*. Semarang: Penerbit FISIP-UNDIP dan JALANMATA.
- Ritzer, G (1975) *Sociology: A Multiple Paradigm Science*. Boston: Allyn and Bacon Inc.
- Rush, M & Althoff, P (2007) *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Saptyasari, A (2004) *Implikasi perseptual mahasiswa terhadap preferensi mereka tentang seorang pemimpin*. *Masyarakat, Kebudayaan dan Politik* 17(1): 45–58.
- Thibaut, JW and Kelley, HH (1959) *The Social Psychology of Groups*. New York: John Wesley & Sons.